



ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

MUSRENBANG

PERUBAHAN RPJMD KALIMANTAN **TIMUR TAHUN 2019-2023 DAN RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

Disampaikan oleh:

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Staf Ahli Menteri Bid. Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Samarinda, 22 April 2021













Curriculum Vitae

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964

Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV e

Riwayat Pendidikan:

- ❖ APDN Riau 1987
- ❖ S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990
- ❖ S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
- **❖** S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Riwayat Jabatan:

- ☐ STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN
- ☐ PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
- ☐ PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU (Februari 2021)
- ☐ PLT. SESTAMA BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2019 2020)
- **☐** PJ. GUBERNUR BENGKULU (2015 2016)
- ☐ REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2013 2015)
- ☐ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2010 2013)
- ☐ KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008 2010)
- ☐ KEPALA BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2007 2008)
- ☐ KEPALA BAPPEDA KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2004 2007)
- ☐ KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2000 2004)
- ☐ CAMAT KARIMUN KAB. KEPRI PROV. RIAU (1999 2000)











GAMBARAN UMUM INDONESIA

1,905 Juta Km²

17.000 Pulau

34 **Provinsi**

416 Kabupaten 98 Kota 7.230 Kecamatan 74.953 Desa

8.488 Kelurahan





Luas mencapai 1.905 juta km2, Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama.



Memiliki 3 Zona Waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).



Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia. Jumlah Penduduk Negara Indonesia adalah 268.583.016 Penduduk









ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020-2024





RPJMN telah ditetapkan Presiden melalui **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020**



RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju



RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan



RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja **Pemerintah (tahunan)**









5. VISI-MISI DAN ARAHAN PRESIDEN SERTA AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

Visi – Misi Presiden

Arahan Presiden

7 Agenda Pembangunan

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan **Kepribadian Bangsa**
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



Pembangunan SDM



Pembangunan Infrastruktur



Penyederhanaan Regulasi



Penyederhanaan Birokrasi



Transformasi Ekonomi

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk **Pertumbuhan yang Berkualitas**
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan **Menjamin Pemerataan**
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



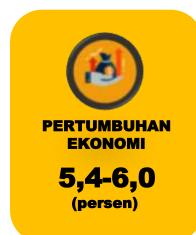






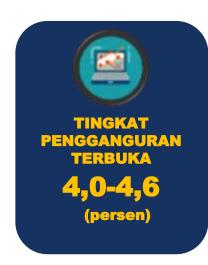


TARGET PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024











SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2022

















Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2022 berupa rancangan awal









PEDOMAN YANG DIGUNAKAN **Untuk Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur**

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - Terjadi perubahan yang mendasar

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Hasil Telaah

Berdasarkan hasil telaah Kementerian **RPIMD** Dalam Negeri, Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku





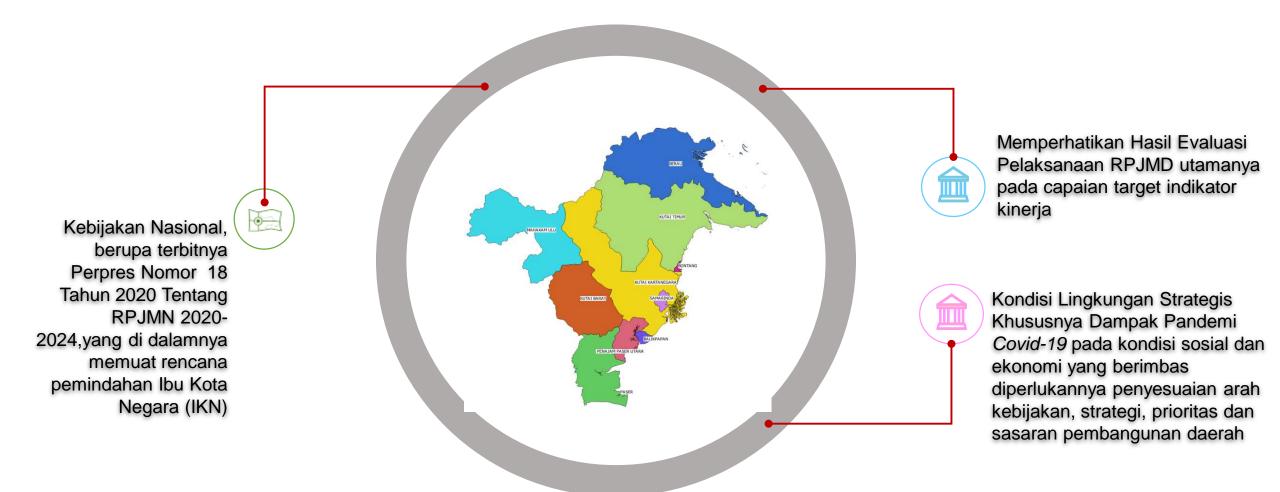








Latar Belakang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur











02

04

HASIL KONSULTASI RANWAL Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 01 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan dari kementerian masing-masing urusan tentang penetapan indikator. Hal ini bertujuan untuk memperbaruhi indikator, satuan dan cara perhitungan

Perlu penambahan kesimpulan hasil pengendalian dan 05 evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja sampai Tahun 2020 pada subbab permasalahan.

Perlu menarasikan dan mensinkronkan data berupa capaian pembangunan seperti matriks, tabel atau grafik yang disajikan sebagai penjelasan atas matriks, tabel atau grafik tersebut

perangkat daerah Penentuan program-program 06 merupakan hasil cascading berdasarkan outcome-outcome perangkat daerah dimaksud.

Perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam menentukan proyeksi anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi terakhir yang mempengaruhi keuangan daerah, contoh kemungkinan perubahan struktur belanja daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Agar dipastikan semua program dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk di dalam Bab VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

Dalam melakukan perumusan masalah, harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek pembangunan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta geografi dan demografi.







TEMA RKP 2020-2022





"REFORMASI STRUKTURAL DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DALAM RANGKA **MENYAMBUT IKN"**









FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Jumlah Wisman 8,5-10,5 juta

Pariwisata



Pengolahan Non Migas 5,8-6,5%

Industri



Pembangunan Rusun 4.600 unit

Infrastruktur



Pertumbuhan Wirausaha 3%

UMKM



Pola Pangan Harapan 92,8

Ketahanan **Pangan**





Transformasi Digital

Pengguna Internet 79,20%



Pembangunan **Rendah Karbon** Penurunan Emisi **GRK** 26,87%



Perlindungan Sosial

Program Jaminan Sosial 87%



Kesehatan

Prevalensi Stunting Balita 18,4%



Pendidikan dan Ketrampilan

Paten Domestik 600









DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Republik Indone





LEMBAGA

KONTRIBUSI

TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN





















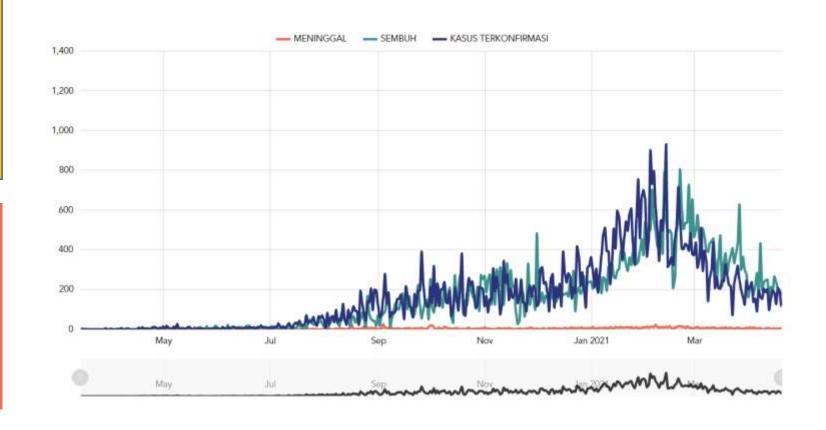
PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI **KALIMANTAN TIMUR (19 April 2021)**

TOTAL KASUS 66,878

TOTAL AKTIF 2,028

TOTAL SEMBUH 63,313

TOTAL **MENINGGAL** 1,600



Perkembangan Kasus harian Provinsi Kalimantan Timur per tanggal 19 April 2021 (+119 Kasus), dengan penambahan kasus tertinggi terjadi pada 12 Februari 2021 (+931 Kasus), dan Penambahan Pasien sembuh tertinggi pada 20 Februari 2021 (+806)









VAKSINASI Covid-19

Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah

Developer Platform		Binding/Firm Order (juta dosis)	Opsi/Potensi (juta dosis)	ETA Indonesia		
Sinovac	Inactivated Virus	125,5		Des 2020 - Jan 2022		
			100	Sep 2021 – Mar 2022		
AstraZeneca Viral Vector (Non Replicating) Novavax Protein Subunit		50	50	Q2 2021 - Q1 2022 Jun 2021 - Mar 2022		
		50	80			
Pfizer RNA Based Vaccine		50	50	Q3 2021 - Q1 2022		
COVAX/GAVI		54	54	Q2 2021 - Q1 2022		
Jumlah Total		329,5	334			
		663,5				
Total kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk		426,8				

Indonesia membutuhkan 15 Bulan untuk Herd *Immunity*

Penambahan jumlah vaksin akan berpengaruh pada percepatan Herd *Immunity*

Aktivitas ekonomi masyarakat dapat dimulai Kembali sebelum Herd *Immunity* pandemi Covid-19 terkendali

Masyarakat tetap bisa melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial dengan menerapkan Prokes.

Progress Vaksinasi 2021







_ANJUTAN

PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

(Per Tanggal 20 April 2021)





KESEHATAN

1.468.764

VAKSIN 1 1.466.955 (99.88%)

VAKSIN 2 1.326.321 (90,30%)

PETUGAS

17.327.169

VAKSIN 1 7.286.759 (42,05%)

VAKSIN 2 3.732.201 (21,54%)

21.553.118

VAKSIN 1 2.241.951 (9,91%)

VAKSIN 2 1.005.818 (3,70%)

Indonesia membutuhkan 15 Bulan untuk Herd *Immunity*

vaksinasi tahap kedua.

Penambahan jumlah vaksin akan berpengaruh pada percepatan Herd *Immunity*

TOTAL 40.349.051

VAKSIN 1 10.996.334 (27,25%)

VAKSIN 2 6.064.340 (15,03%)

Aktivitas ekonomi masvarakat dapat dimulai Kembali sebelum Herd ImmunityI pandemi Covid-19 terkendali

Masyarakat tetap bisa melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial dengan menerapkan Prokes.





Total sasaran vaksinasi di Indonesia untuk mencapai herd immunity adalah

sebanyak 181.554.465 orang. Untuk sasaran vaksinasi SDM kesehatan sebanyak 1.468.764 orang, 99,88% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama

Adapun untuk sasaran vaksinasi petugas publik adalah sebesar 17.327.169 orang, 42,05% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama 21,54% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Untuk sasaran vakasinasi lansia sebanyak 21.553.118 orang, 9,91% sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan 3,70% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Sementara untuk total

keseluruhannya, dari <mark>3 (tiga) ketegori tersebut di atas, 23,23% sudah</mark>

mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan 11,64% sudah mendapatkan

dan 90.30% sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua.







PENGADAAN VAKSIN





Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi **Dalam Rangka** Penanggulangan Pandemi Covid-19

POIN-POIN PENTING

- 1. Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global dan bencana nasional non alam.
- 2. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19 diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin sesuai ketersediaan dan kebutuhan ditetapkan Pemerintah.



DUKUNGAN KEMENDAGRI

Mendagri memberikan dukungan dengan mengoordinasikan Pemda provinsi dan kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Vaksinasi **COVID- 19 (Pasal 21 Ayat 6).**

VAKSIN BERBASIS VIRUS MURNI

- Dikenal dengan istilah whole virus based atau inactivated vaccine. Virus dimatikan atau dibunuh sehingga tidak berbahaya bagi orang Kelebihan: telah umum digunakan sehingga sudah bisa diketahui kualitasnya.
- Antigen komplit dan adjuvan atau substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh dapat memicu sistem imun tubuh. Contoh: Vaksin Sinovac, Vaksin Sinopharm

VAKSIN BERBASIS VEKTOR ADENOVIRUS

- Belum ada contoh yang telah dipasarkan atau diedarkan di masyarakat. Karakter dari adenovirus vector vaccine dinilai mampu menstimulasi tubuh sehingga menghasilkan imun yang lebih komplit, lebih kuat dan lebih tahan lama.
- Metode belum dapat dibuktikan sehingga aspek regulasinya akan cenderung lama. Contoh: Vaksin CanSino

VAKSIN YANG BERBASIS GEN ATAU DNA

- Dikenal juga dengan istilah mRNA vaccine. Proses pembuatan vaksin relatif cepat dibandingkan dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya.
- Belum ada yang dipasarkan karena belum dapat dibuktikan dari sisi daya guna dan keamanannya.
- Vaksin berbasis gen baru digunakan kepada binatang, belum untuk manusia.

VAKSIN SUB UNIT ATAU BERBASIS PROTEIN

- Telah dibuktikan khasiatnya karena telah ada contoh-contoh sebelumnya yang beredar di masyarakat.
- Belum ditemukan efek samping dari metode vaksin tersebut.
- Proses pembuatan tergolong cepat.

INDONESIA MEMILIH VAKSIN SINOVAC DAN VAKSIN SINOPHARM

karena metode pembuatan vaksin menggunakan *platform inactivated* atau virus yg dimatikan dan sudah dikuasai Indonesia, serta keterjangkauan harga, efek samping yang rendah, memiliki dosis tunggal, dan memperhatikan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.









DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PROGRAM VAKSINASI SEBAGAI UPAYA MITIGASI COVID-19





Menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi Duta Perubahan Perilaku

Menegakkan Protokol Kesehatan, Sekaligus Mendukung Program Vaksinasi dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19, serta menjadi influencer pendukung vaksinasi dengan membuat konten kampanye yang menyatakan sikap siap divaksin.

- Satpol PP di daerah terus memonitor dan melakukan penegakan protokol kesehatan, serta membuat laporan, baik report harian, mingguan dan bulanan.
- Integrasi layanan dasar trantibum linmas dituangkan pada SPBE dan pembuatan Video Profile Satpol PP.



Program 2021 Kemendagri

Pembentukan kualitas Satpol PP menjadi lebih baik,

menjunjung tinggi kode etik dan mampu bekeria secara konseptual.



DISIPLIN POL PP

- Hak Dan Kewajiban
- Jenis Penyelenggaraan Disiplin
- Sanksi
- Penghargaan Dan Pembinaan
- Pembinaan Dan Pengawasan
- Demosi

TATA KEHIDUPAN POL PP

- Kode Kehormatan
- Tata Krama, Kegiatan Mekanisme Izin dan Dispensasi

Kemendagri senantiasi membangun Komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Penyediaan data lengkap Penerima Vaksin dalam setiap tahapannya dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dalam KTP Elektronik











PERKEMBANGAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA





TREN PERBAIKAN EKONOMI





BERPENGARUH PADA TEMA RKP DAN RKPD





PERKEMBANGAN KONDISI SAAT INI



GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





Jumlah Penduduk

3.769.073 Jiwa





Laki-laki

1.955.542 jiwa



Perempuan

1.813.531 jiwa



Batas Wilayah Prov. Kalimantan Tengah

-Sebelah Utara: Kalimantan Utara

-Sebelah Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi

-Sebelah Barat: Kalimantan Tengah

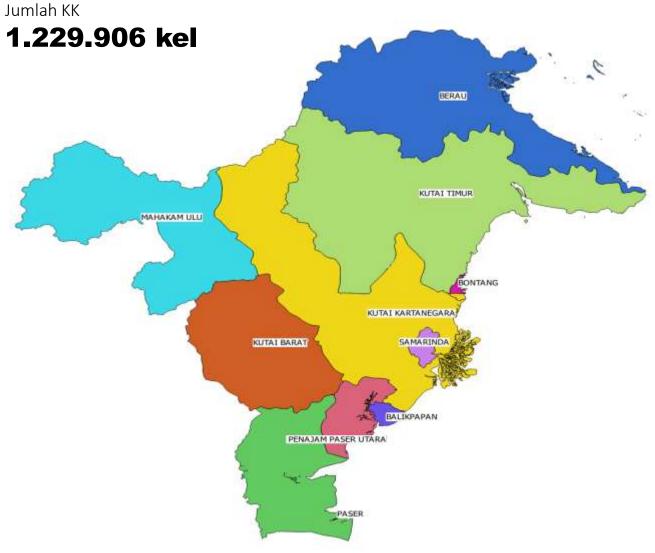
-Sebelah Selatan: Kalimantan Selatan





7 Kabupaten

3 Kota





CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVI



Pertumbuhan Ekonomi

-5,46%



Kemiskinan



Gini Ratio

0,335



Pengangguran



Indeks Pembangunan Manusia

76,24

PERAN KEMENDAGRI DALAM **PEMBANGUNAN DAERAH**

PEMBINA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

> **EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**



PEMBUAT KEBIJAKAN DAN REGULASI **TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH**

PENGAWAS PEMBANGUNAN DAERAH











ARAHAN PENYUSUNAN RKPD 2022

MEMPERHATIKAN

Peraturan & Kebijakan

Pemda perlu mensinkronkan peraturan dan kebijakan Pemerintah seperti percepatan penyaluran banson/JPS dan lainnya

Kondisi & Potensi

Kondisi dan potensi daerah perlu diperhatikan terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi

SIPD

Pemda agar menggunakan SIPD dalam proses penyusunan RKPD











RPJMD

RPJMD perlu diperhatikan karena merupakan pedoman dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

Rakortekrenbang

Hasil Rakortekrenbang agar ditindaklanjuti dan disinkronkan dalam penyempurnaan rancangan RKPD











1. PERATURAN DAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH (update)











Kementerian Dalam Negeri Republik Indone

1.A. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDEKATAN URUSAN PEMERINTAHAN



RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah











PROGRES PELAKSANAAN & AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING





• MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

KAB/KOTA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

TAHUN 2022

100 KAB/KOTA **INTERVENSI 1000 DESA**

160 KAB/KOTA **INTERVENSI 1000 DESA**

260 KAB/KOTA **INTERVENSI LOKUS DESA DITENTUKAN PEMDA**

360 KAB/KOTA **INTERVENSI LOKUS DESA DITENTUKAN PEMDA**

514 KAB/KOTA **INTERVENSI LOKUS DESA DITENTUKAN PEMDA**

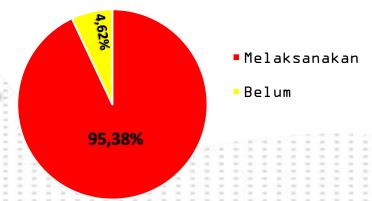
MONITORING PENURUNAN PELAKSANAAN KONVERGENSI MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA SECARA PLOS NUHAT JANOIZAN

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
88,13%	83,75%	81,88%	85,50%	82,50%	78,75%	80,63%	77,50%

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN WEB MONITORING AKSI DSDS NUHAT JANOIZAN

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
95,38%	94,62 %	94,62%	93,46%	88,85%	88.46%	89.62%	81.92%

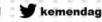
PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN & AKSI **PENURUNAN** KONVERGENSI STUNTING

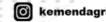


PADA DARI 160 TAHUN 2019-KABUPATEN/KOTA INTERVENSI KAB/KOTA TELAH 142 (88-13%) KONVERGENSI 2020 KAB/KOTA KAB/KOTA 248 (95,38%) **MELAKSANAKAN AKZI**









1.C. KEBIJAKAN LAINNYA

SE Mendagri No 846/1994/SJ, tanggal 23/03/2021 tentang Percepatan Penyaluran Bansos dan JPS di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa



Mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan pencairan/realisasi anggaran Belanja Bansos/JPS kepada Keluarga Penerima Manfaat dan Masyarakat terdampak Covid-19

Mendorong Walikota dan Bupati melakukan inovasi untuk transparansi penyaluran Bansos/JPS agar tepat sasaran

Surat Mendagri No 593/5093/SJ, tanggal 11/09/2020 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Reforma Agraria



Mendorong Pemda untuk mendukung pemberdayaan terhadap subyek reforma agraria

Diintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD

Permendagri No. 90/2019-Kepmendagri 050-3708/2020 terkait Nomenklatur Program Kegiatan, Subkegiatan

Diterapkan ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra





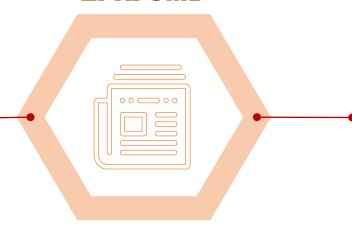




ISU STRATEGIS RPJMD

- Peningkatan Daya Saing Manusia (SDM)
- ☐ Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis SDA tidak terbarukan (Vertikal maupun Horizontal)
- ☐ Peningkatan Aksesbilitas dan Penguatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah
- ☐ Peningkatan Kualitas Lingkungan HidupKedaulatan pangan dan energi
- ☐ Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
- ☐ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018
- ☐ Pembangunan IKN
- ☐ Kaltim Sehat dan Ketahanan Pangan, Perencanaan Reformasi Sosial dan Pelayanan Publik dengan Tatanan Budaya New Normal

2. RPJMD



VISI RPJMD

"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

MISI RPJMD

- Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur Kewilayahan.
- Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang Berkelanjutan.
- Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVI

Bidang 1



Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM

Bidang 2



Penguatan Pelaku Dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Bidang 3



Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan

Bidang 4



Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN

Bidang 5



Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik











PREDIKSI MAKRO EKONOMI PROVINSI **KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**



No	Indikator Kinerja Utama	Target/Realiasai Capaian (RPJMD Murni)				Target Capaian (RPJMD Perubahan)		
		T.2019	R.2019	T.2020	R.2020	T.2021	T.2022	T.2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3	76,61	75,43	76,24	76,75	77,25	77,75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,10	5,94	7,09	6,05	6,00	5,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	6,09	-	6,88	6,81	6,75	6,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,77	3,5±1	-5,46	-1,00	0,00	0,50
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	-	175.65	-	n/a	167.5	170	175
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	5,35	6±1	-1,56	1,5	2	2,5
7	Indeks Gini	0,330	0,330	0,330	0,328	0,313	0,313	0,308
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	78.81	75.85	75.95	75.95	81.61	82.52
9	Nilai Tukar Petani	-	94.63	-	-	101	103	105
10	Indeks Reformasi Birokrasi	-	B (70,50)	-	B (71,50)	B (71,50)	В (72,50)	B (74,50)







ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH **SELAMA PANDEMI COVID-19**

REORIENTASI BELANJA MODAL

Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan); Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

DUKUNGAN PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

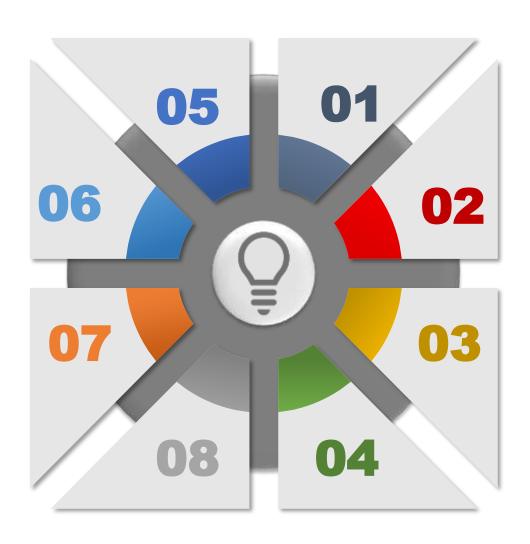
Menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

dan perluasan ETPD dalam rangka Percepatan mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL

protokol Penegakan disiplin Covid-19, tetap memprioritakan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja



SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional

PEMBIAYAAN ALTERNATIF

keberlanjutan Menjaga fiskal, dengan tetap kehati-hatian (pruden), mengedepankan prinsip transparan, akuntabel terutama dalam dan pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah

KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antardaerah diharapkan menghasilkan efesiensi efektifitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah

EVALUASI HIBAH DAN BANSOS

Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos









PENYESUAIAN ALOKASI APBD

Penyesuaian alokasi anggaran, meliputi perubahan alokasi anggaran pada:

- kelompok;
- jenis;
- obyek; dan/atau
- rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Diprioritaskan untuk:



Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan,

antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *Covid-19*;

Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masingmasing tetap hidup,

antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net,

antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19.









SINKRONISASI FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

_

_

_



10 FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL



Industri

Infrastruktur

UMKM

Ketahanan Pangan

Transformasi Digital

Pembangunan Rendah Karbon

Perlindungan Sosial

Kesehatan

Pendidikan dan Ketrampilan

3 dari 10 fokus pembangunan nasional telah dibahas secara intensif di dalam Kortekrenbang 2021 antara Daerah, K/L, Kemendagri dan Bappenas

Intensitas Pembahasan Urusan dalam Rakortek Prov. Kalimantan Timur



Sumber: Hasil Pembahasan Desk dalam Kortekrenbang 2021

Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah menyesuaikan hasil Kortekrenbang dan sekaligus menambahkan fokus Pembangunan Rendah Karbon, Kesehatan, Pariwisata, Industri, Ketahanan Pangan, Transformasi Digital dan Perlindungan Sosial.



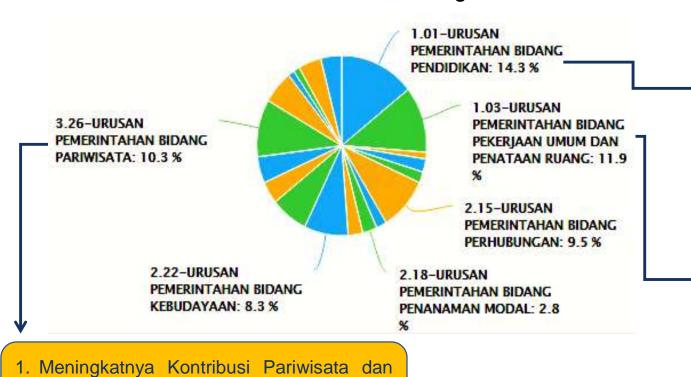




KINERJA URUSAN YANG MENDUKUNG FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN PADA KORTEKRENBANG



Intensitas Pembahasan Urusan dalam Kortekrenbang Prov. Kalimantan Timur



- 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan
- 2. terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing
- 3. Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah
 - 1. Terwujudnya konektivitas jalan
 - 2. Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
 - 3. Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
 - 4. Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut
 - 5. Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang







Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan

Ekonomi Nasional



HASIL RAKORTEKRENBANG 2021





(USULAN KALIMANTAN TIMUR YANG DISETUJUI K/L)



Total Usulan Provinsi Diakomodir: 5 usulan Total Usulan Provinsi Dibahas lebih lanjut: 22 usulan

Diakomodir

- 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
- 2. Bantuan Benih padi hibrida (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Samarinda)
- PLTS Atap (Kota Samarinda)
- Bantuan benih jagung (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda)
- 5. Pelatihan pelatih olahraga prestasi se -Kalimantan Timur (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)

Dibahas lebih lanjut

- 1. Bantuan untuk Graduasi Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH)
- 2. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalan Akses Pulau Balang (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
- 3. Penanganan Banjir Kota Samarinda dan Kota Bontang (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda, Kota Bontang)
- 4. Penanganan Banjir Kota Balikpapan (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
- 5. Pembangunan Fly Over Muara Rapak (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
- 6. Pembangunan Jalan Tol Samarinda Bontang (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda, Kota Bontang)
- 7. Pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Usulan Rakorgub) (Kab. Mahakam Ulu)
- 8. Pembangunan Gedung TPI dan Perluasan PPI Manggar Baru (Usulan Rakorgub) (Kota Balikpapan)
- 9. Pengembangan Korporasi Desa Sapi di Kalimantan Timur (Usulan Rakorgub) (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara)
- 10. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu)

Dibahas lebih lanjut

- 11. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
- 12. Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas (Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu)
- 13. Pelatihan bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kalimantan Timur (Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang)
- 14. Pengerukan Danau Kaskade Mahakam (Kab. Kutai Barat)
- 15. Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (Kab. Berau)
- 16. Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi masyarakat yang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya Kota Balikpapan, Kota Bontang)
- 17. Penggantian Pipa Transmisi Air Baku IPA Manggar Km.8 (Kota Balikpapan)
- 18. Pengerukan Alur Sungai Mahakam (Usulan Rakorgub) (Kota Samarinda)
- 19. Pengembangan Pelabuhan Maloy (kab. Kutai Timur)
- 20. Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Kota Balikpapan)
- 21. Pengerukan kolam labuh/putar dan alur pelayaran PPI Sangata -Kutai Timur dan PPI Tanjung Limau-Bontang (Kab. Kutai Timur, Kota Bontang)
- 22. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (Kota Balikpapan, Kota Bontang)





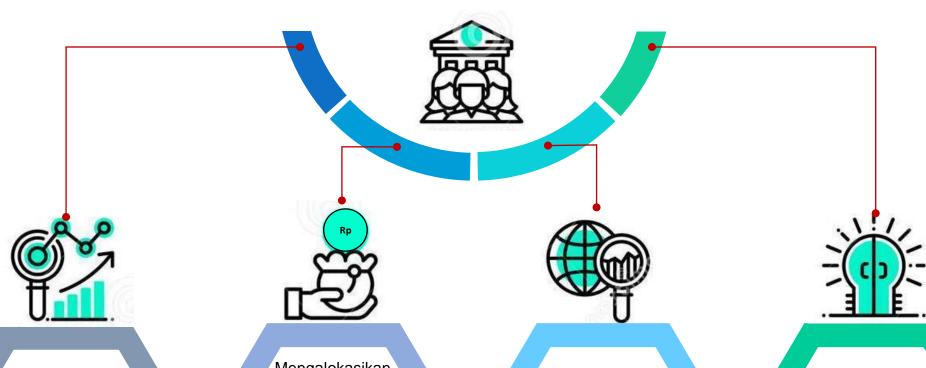








RKPD TAHUN 2022 DITUJUKAN UNTUK



Berkontribusi pada pencapaian target Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan masingmasing Pemda

Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 dan terkait kesehatan serta penanganan dampak ekonomi

Menguatkan sektorsektor unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi

Mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah













TERIMAKASIH







